

Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Berdasarkan Prinsip Syariah Di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Rini¹, Wargo², Ribut Suwarsono³, Kurniawan⁴, Siti Fatimah⁵, Pini Susanti⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: rinikehutanan@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

School financial management is a crucial aspect of educational administration, aiming to ensure the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of fund utilization. From an Islamic economic perspective, financial management is not merely administrative; it must be grounded in Islamic values such as trustworthiness (*amanah*), justice, transparency (*syafafiyah*), accountability (*mas'uliyah*), and public interest (*maslahah*). However, practical challenges persist in applying Sharia principles to financial management within educational institutions, necessitating a deeper analysis of their alignment with Sharia economic legal principles. This study employs a qualitative approach through field research. Data were collected via observation, interviews, and document analysis involving the madrasah head, treasurer, school committee, and other parties involved in financial management. Data analysis proceeded through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was verified through source and technique triangulation. The research findings indicate that financial management at Madrasah Aliyah in East Tanjung Jabung Regency is generally conducted through stages of planning, implementation, recording, reporting, and accountability in accordance with prevailing regulations. From a Sharia perspective, most management practices reflect the principles of trustworthiness, transparency, and accountability; however, certain aspects require improvement—specifically, optimizing information disclosure to all stakeholders and strengthening the financial managers' understanding of Sharia-based financial governance. Supporting factors for implementing Sharia principles include the school's commitment, clear regulations, and internal oversight systems, whereas inhibiting factors include limited human resources and a lack of training regarding Sharia financial management.

Keywords: *School Financial Management, Sharia Principles, Sharia Economics, Madrasah Aliyah, Transparency, Accountability.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui proses pendidikan, seseorang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan dalam kehidupan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya bergantung pada kualitas tenaga pendidik maupun kurikulum yang diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya keuangan (Fattah, 2012).

Keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan dan pengelolaan dana yang baik memungkinkan sekolah melaksanakan berbagai program pendidikan secara efektif, seperti kegiatan pembelajaran, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta kegiatan pendukung lainnya. Sebaliknya, pengelolaan

keuangan yang kurang optimal dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Mulyasa, 2018).

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan proses pengaturan dan pemanfaatan dana pendidikan yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan keuangan. Setiap tahapan tersebut perlu dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan bertanggung jawab agar penggunaan dana pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan (Supriadi, 2010).

Perkembangan zaman yang semakin maju membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola keuangan sekolah yang profesional dan bertanggung jawab. Masyarakat saat ini semakin menaruh perhatian terhadap bagaimana dana pendidikan dikelola oleh lembaga pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek yang sangat penting karena dana pendidikan umumnya bersumber dari pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan sering dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan manajemen sekolah dalam menjalankan fungsinya secara efektif (Fattah, 2017).

Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara efektif dan efisien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Ketersediaan dana yang dikelola dengan baik dapat mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta pelaksanaan berbagai program pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sebaliknya, pengelolaan dana yang tidak optimal dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan dan berdampak pada menurunnya kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik (Mulyasa, 2018).

Dalam pandangan Islam, pengelolaan keuangan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Swt. Islam menekankan pentingnya penggunaan harta secara benar, jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap aktivitas pengelolaan keuangan dalam lembaga pendidikan Islam seharusnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab (Antonio, 2011).

Dalam perspektif syariah, pengelolaan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan efisiensi. Prinsip amanah mengandung makna bahwa setiap pihak yang diberi tanggung jawab dalam mengelola keuangan harus melaksanakannya dengan penuh kejujuran, integritas, serta rasa tanggung jawab terhadap seluruh dana yang dipercayakan kepadanya. Sementara itu, transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai seluruh proses penerimaan dan pengeluaran dana sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain aspek tersebut, prinsip keadilan juga menjadi landasan utama dalam tata kelola keuangan berbasis syariah. Setiap alokasi anggaran harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kepentingan lembaga pendidikan tanpa adanya diskriminasi ataupun penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak tertentu. Dengan penerapan prinsip keadilan, distribusi sumber daya keuangan diharapkan mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh komponen Lembaga (Ascarya, 2015).

Di samping itu, syariah juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan dana. Pengeluaran anggaran hendaknya dilakukan secara bijaksana, tidak berlebihan, dan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendukung tercapainya tujuan lembaga. Islam melarang perilaku israf (pemborosan), sehingga setiap penggunaan dana harus mempertimbangkan nilai kemanfaatan serta efektivitasnya agar mampu memberikan dampak yang optimal bagi kemajuan sekolah maupun peningkatan kualitas peserta didik.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Madrasah Aliyah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Selain memberikan pendidikan umum, Madrasah Aliyah juga berperan dalam menanamkan ajaran Islam sehingga tata kelola lembaga, khususnya di bidang keuangan,

diharapkan mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (Mulyasa, 2018).

Sumber pendanaan Madrasah Aliyah berasal dari berbagai pihak, di antaranya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan pemerintah daerah, kontribusi masyarakat, serta sumber-sumber lain yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Keberagaman sumber pendanaan tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang tertib, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara optimal dan terhindar dari penyimpangan (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep ideal. Berbagai kendala masih dijumpai dalam praktiknya, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen keuangan syariah, rendahnya pemahaman terhadap konsep tata kelola keuangan berbasis syariah, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana pendidikan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penerapan prinsip syariah dalam tata kelola keuangan madrasah.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata kelola lembaga pendidikan yang baik, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan juga semakin besar. Orang tua peserta didik, komite sekolah, maupun masyarakat mengharapkan adanya keterbukaan informasi mengenai sumber perolehan dana serta mekanisme penggunaannya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dituntut untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Adanya perbedaan antara konsep ideal dan praktik di lapangan menjadi salah satu dasar penting dilaksanakannya penelitian ini. Secara normatif, pengelolaan keuangan berbasis syariah seharusnya dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai amanah, keterbukaan, pertanggungjawaban, keadilan, dan pemanfaatan dana secara efektif serta efisien. Namun demikian, diperlukan bukti empiris untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam, khususnya pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan prinsip syariah juga masih relatif terbatas dibandingkan penelitian yang membahas manajemen pendidikan secara umum. Padahal, aspek keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah dan manajemen pendidikan Islam.

Pemilihan Madrasah Aliyah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan institusi pendidikan Islam yang secara ideal harus menerapkan nilai-nilai syariah dalam tata kelola keuangannya. Selain itu, penelitian di lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan keuangan yang berlangsung di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan prinsip syariah. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah. Adapun subjek penelitian ini meliputi: Kepala Madrasah Aliyah, Bendahara sekolah, Wakil Kepala Madrasah bidang sarana dan prasarana, Komite sekolah, dan Guru yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan program sekolah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kepala madrasah, bendahara sekolah, komite sekolah, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah. Data sekunder merupakan data

pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti laporan keuangan sekolah, RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah), buku pedoman pengelolaan keuangan madrasah, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya yang relevan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah, termasuk proses perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Sementara itu, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang telah ditentukan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengelolaan keuangan sekolah dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti laporan keuangan, RKAM, notulen rapat, struktur organisasi, foto kegiatan, serta dokumen lain yang mendukung data penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan sehingga sesuai dengan fokus penelitian. Sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh. Adapun tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan verifikasi secara terus-menerus untuk memastikan kebenaran data dan temuan penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan prinsip syariah di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pembahasan penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori pengelolaan keuangan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

A. Analisis Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian, Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Hal tersebut terlihat dari adanya penyampaian informasi mengenai penggunaan dana kepada pihak yang memiliki kepentingan, seperti kepala madrasah dan komite sekolah. Transparansi dilakukan melalui rapat evaluasi, penyampaian laporan keuangan, serta pembahasan program yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Dalam perspektif pengelolaan keuangan syariah, transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam menjalankan amanah agar tidak terjadi penyalahgunaan harta. Pengelola keuangan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai penerimaan dan penggunaan dana sehingga pihak terkait dapat melakukan pengawasan. Penerapan prinsip transparansi di madrasah menunjukkan adanya upaya menciptakan kepercayaan antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah sebagai sumber pendanaan.

Dengan demikian, praktik pengelolaan keuangan di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah sesuai dengan prinsip transparansi karena setiap penggunaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh pihak yang berwenang.

B. Analisis Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan madrasah. Hal ini dapat dilihat dari adanya pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana serta penyusunan laporan keuangan secara berkala. Setiap penggunaan anggaran juga dilengkapi dengan bukti transaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki makna bahwa setiap amanah yang diberikan kepada seseorang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada manusia maupun kepada Allah Swt. Pengelola keuangan tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola dana secara jujur dan amanah

Penerapan akuntabilitas tersebut menunjukkan bahwa madrasah telah melaksanakan tata kelola keuangan yang baik karena setiap aktivitas keuangan dapat ditelusuri, diperiksa, dan dievaluasi oleh pihak yang berkepentingan.

C. Analisis Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berusaha menerapkan prinsip keadilan. Hal tersebut terlihat dari proses pengalokasian anggaran yang didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program sekolah, bukan berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan harta. Setiap pihak harus memperoleh hak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana pendidikan harus memberikan manfaat secara luas bagi seluruh warga sekolah, baik peserta didik, guru, maupun tenaga kependidikan. Oleh karena itu, pengalokasian dana yang dilakukan madrasah menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan pemerataan manfaat dan menghindari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.

D. Analisis Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah berusaha mengelola dana secara efisien dan efektif dengan menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Dana yang tersedia diarahkan kepada kegiatan yang memiliki manfaat langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan berarti menggunakan sumber daya yang tersedia secara hemat dan tepat guna, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Dalam Islam, penggunaan harta harus dilakukan secara bijaksana dan tidak boleh mengarah pada pemborosan.

Penerapan prinsip ini terlihat dari upaya madrasah dalam menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan utama sekolah, sehingga dana yang terbatas tetap mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi kegiatan pendidikan.

E. Analisis Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Pengelolaan dana dilakukan melalui prosedur yang jelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya praktik pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, maupun maysir. Setiap transaksi dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan bertujuan untuk mendukung kegiatan pendidikan.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menempatkan harta sebagai amanah dari Allah Swt. sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dana dan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kompetensi pengelola keuangan serta penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan keuangan madrasah dapat berjalan lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Berdasarkan Prinsip Syariah di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan sekolah di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, madrasah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) dengan melibatkan kepala madrasah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Pelaksanaan keuangan dilakukan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan pelaporan dilakukan melalui

- pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara berkala. Pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah, komite sekolah, pengawas madrasah, dan pihak terkait untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan.
2. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan madrasah telah dilakukan melalui keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan. Penyampaian laporan keuangan kepada kepala madrasah dan komite sekolah menjadi bentuk upaya madrasah dalam membangun kepercayaan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana.
 3. Penerapan prinsip akuntabilitas terlihat dari adanya pencatatan setiap transaksi keuangan yang disertai bukti pengeluaran yang sah. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan kepada pihak yang memberikan amanah dan pihak yang melakukan pengawasan.
 4. Prinsip keadilan, efisiensi, dan efektivitas telah diterapkan melalui pengalokasian dana berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah. Penggunaan anggaran diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan serta menghindari pemborosan.
 5. Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencerminkan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan keadilan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya praktik pengelolaan keuangan yang mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir.
 6. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu adanya komitmen kepala madrasah, kerja sama antara pihak sekolah dan komite, serta adanya pedoman pengelolaan keuangan dari pemerintah. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan dana, adanya kebutuhan sekolah yang bersifat mendadak, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam administrasi keuangan.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan sekolah di Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berjalan dengan cukup baik dan telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana pendidikan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Diharapkan madrasah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Sistem pencatatan serta pelaporan keuangan perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan dana menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi pengelola keuangan sekolah
Bendahara dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi administrasi keuangan serta memahami lebih mendalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan syariah agar amanah yang diberikan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Bagi komite sekolah dan masyarakat
Diharapkan komite sekolah dan masyarakat dapat terus berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta memberikan masukan terhadap pengelolaan dana pendidikan sehingga tercipta kerja sama yang baik antara madrasah dan masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, seperti membandingkan pengelolaan keuangan beberapa madrasah atau mengkaji aspek lain dalam manajemen keuangan syariah.

Dengan adanya peningkatan pengelolaan dan pengawasan keuangan secara berkelanjutan, diharapkan madrasah mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fattah, Nanang. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. California: Sage Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rozalinda. *Fiqh Muamalah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.